

POLICY BRIEF KEMISKINAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Sejak resmi memisahkan diri dari Sumbawa pada tahun 2003, Kabupaten Sumbawa Barat terus berbenah dan berupaya menyetarakan diri dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB. Tujuan pembentukan Sumbawa Barat adalah mulia yaitu untuk mempercepat pengembangan pembangunan menuju masyarakat yang bermartabat dan sejahtera merata dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, kemandirian yang telah diperoleh benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk semakin memajukan masyarakat di Sumbawa Barat. Menjadi kabupaten dengan luas terbesar ke 4, penduduk Sumbawa Barat ternyata hanya 2,76 persen dari total jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk di Sumbawa Barat memang yang terkecil diantara kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi NTB. Patut disyukuri Sumbawa Barat telah berhasil menurunkan kemiskinan dari 21,81 persen pada tahun 2010 menjadi 13,54 persen pada tahun 2021. Namun hal ini belum cukup, pemerintah daerah masih terus mengupayakan agar kemiskinan di Sumbawa Barat dapat menembus 1 digit.

Sejatinya jumlah penduduk Sumbawa Barat mendekati jumlah penduduk Kota Bima. Pada tahun 2021 saja penduduk Sumbawa Barat mencapai 148,5 ribu jiwa sedang Kota Bima sebesar 156,2 ribu jiwa. Memiliki penduduk yang sebanding, ternyata kemiskinan di Kota Bima lebih dulu mencapai 1 digit yaitu sebesar 8,65 persen. Berbagai upaya dan kebijakan telah diambil oleh pemerintah daerah Sumbawa Barat untuk bisa menurunkan kemiskinan dengan cepat, namun hasilnya kemiskinan di Sumbawa Barat belum bisa menembus satu digit. Merespon niat baik pemerintah daerah, BPS mencoba memberikan *policy brief* untuk memberi gambaran karakteristik penduduk miskin di

Sumbawa Barat sehingga dapat memberi rekomendasi kebijakan untuk mempercepat upaya pemerintah daerah menurunkan kemiskinan di Sumbawa Barat. Upaya penanganan kemiskinan harus terintegrasi melalui intervensi kolaboratif dari para pihak. Para pihak disini bukan hanya OPD terkait, namun juga mencakup masyarakat, swasta dan filantropis.

Pentingnya Memahami Karakter

Mengenal karakteristik penduduk miskin di Sumbawa Barat menjadi kunci agar intervensi kebijakan yang dilakukan dapat tepat sasaran. Karakter setiap daerah tidaklah sama, kebijakan yang efektif diterapkan di satu daerah belum tentu efektif dilakukan di daerah lainnya. Contoh sederhana adalah bahasa daerah antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kedekatan wilayah tidak lantas membuat kedua kabupaten ini identik. Karenanya pemahaman mengenai kondisi kemiskinan di Sumbawa Barat dan yang melatarbelakanginya diperlukan agar tidak salah bidik.

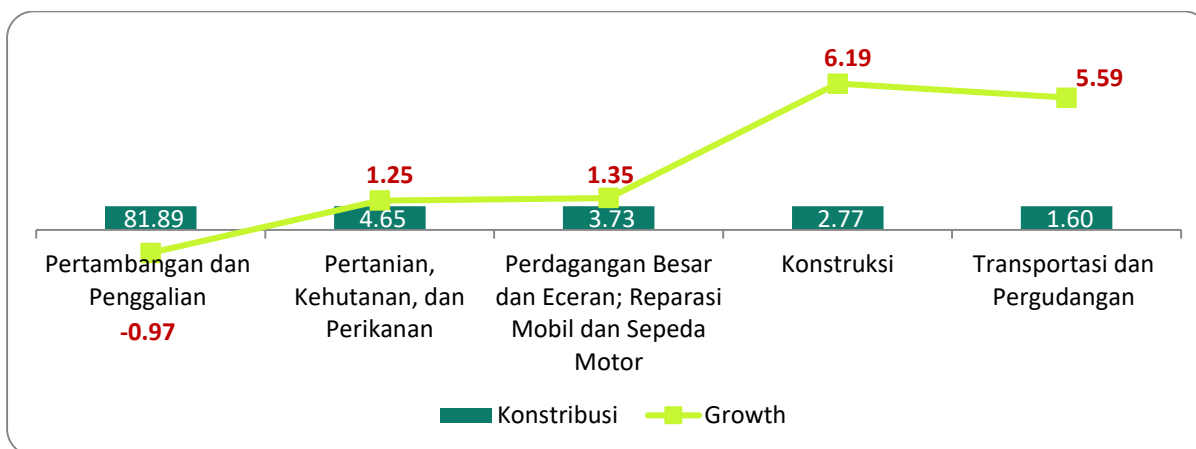
1. Ekonomi Sumbawa Barat

Bukan rahasia bahwa Sumbawa Barat terkenal karena keberadaan pertambangan bijih logam PT. AMNT. Keberadaan tambang ini disinyalir telah mempengaruhi pola perekonomian di Sumbawa Barat kendati sebagian kecil saja penduduk Sumbawa Barat yang bekerja pada sektor ini. Apabila ditelisik dari struktur perekonomian Sumbawa Barat, hingga 2021 selain pertambangan PT. AMNT, Sumbawa Barat didominasi oleh pertanian, perdagangan, konstruksi dan transportasi dan pergudangan. Artinya pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Sumbawa Barat.

Dengan kontribusi mencapai 4,65 persen pertanian Sumbawa Barat menopang perekonomian dengan potensi pada pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.

Pertumbuhan sektor pertanian di tahun 2021 sendiri cenderung lebih lambat dibanding sektor perdagangan, konstruksi maupun transportasi dan

perdagangan. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam menurunkan kemiskinan di Sumbawa Barat, di mana 38,6 persen penduduk miskin di Sumbawa Barat nyatanya bekerja pada sektor pertanian. Menggenjot kinerja pertanian sambil mengupayakan kesejahteraan petani bisa menjadi stimulan kebijakan ekonomi yang *pro poor*.

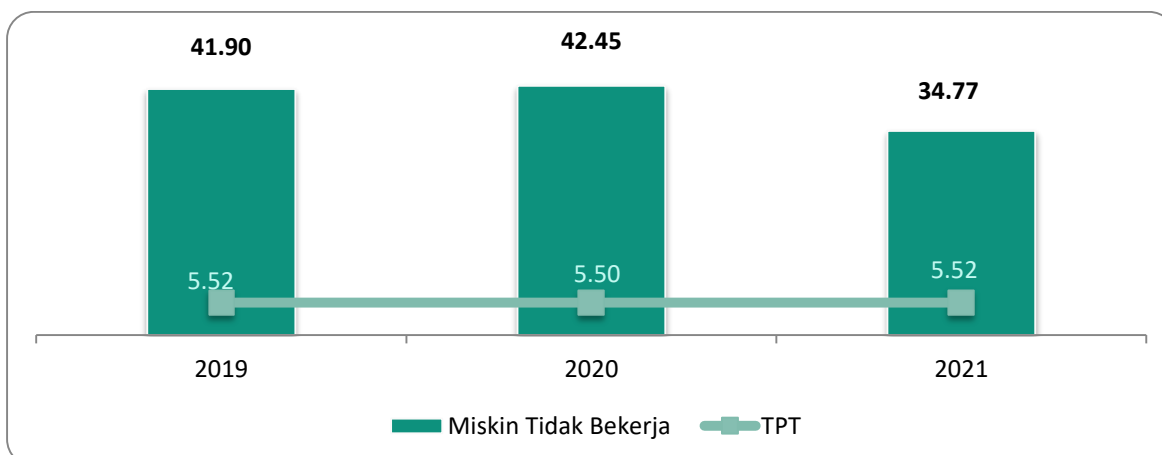


Gambar 1. Top 5 Kontributor Perekonomian Sumbawa Barat dan Laju Pertumbuhan 2021

2. Ketenagakerjaan dan Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil pendataan BPS, sebagian besar penduduk miskin di Sumbawa Barat tidak bekerja. Pada tahun 2019 saja masih terdapat 41,90

persen penduduk miskin yang tidak bekerja. Persentasi ini sedikit berkurang menjadi 34,77 persen di tahun 2021. Kondisi ini dirasa cukup menjadi perhatian, terlebih jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran Sumbawa Barat.



Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Tidak Bekerja VS Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2021

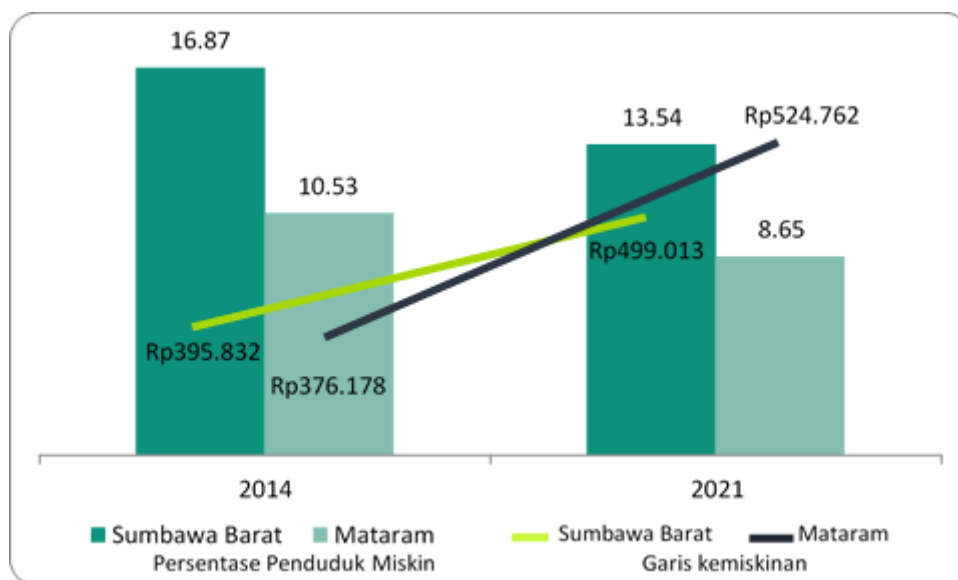
Tingkat pengangguran terbuka di Sumbawa Barat dalam 3 tahun terakhir seolah tidak beranjak. Ketika disandingkan dengan data yang menjabarkan bahwa penduduk miskin masih banyak yang tidak bekerja menjadi poin berikutnya yang patut menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penurunan kemiskinan.

3. Garis Kemiskinan dan Harga

Garis kemiskinan menjadi ambang penduduk dinyatakan miskin. Sebagai representasi dari biaya minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara

dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan, Garis Kemiskinan menjadi elemen penting yang perlu dicermati. Tinggi rendahnya garis kemiskinan akan menentukan banyaknya penduduk yang dikategorikan miskin, hampir miskin dan tidak miskin.

Pada tahun 2014, garis kemiskinan Sumbawa Barat merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya di NTB. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2021 garis kemiskinan Sumbawa Barat menjadi yang tertinggi ke 2 setelah kota Mataram.



Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram tahun 2014 VS tahun 2021

Apabila dibandingkan dengan Kota Mataram, tampak bahwa walaupun garis kemiskinan mataram melampaui garis kemiskinan Sumbawa Barat, namun persentase penduduk miskin mataram dapat ditekan di bawah 10 persen, sedangkan Sumbawa Barat masih di atas 10%. Dalam konsep BPS, kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi pengeluaran atau pendapatan untuk hidup layak minimum yang didasarkan pada nilai rupiah minimal untuk menebus sejumlah makanan dan pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian faktor harga bahan makanan maupun bukan makanan menjadi krusial. Ketika harga-harga terlalu tinggi dan tidak

terjangkau untuk dibeli, maka penduduk akan jatuh miskin.

Dalam pantauan data BPS, harga rata-rata beberapa bahan makanan pokok di Sumbawa Barat cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten tetangganya yaitu Lombok Timur dan Sumbawa. Persentase penduduk miskin Sumbawa dengan Sumbawa Barat sendiri hanya terpaut 0,37 poin dimana persentase penduduk miskin Sumbawa sebesar 13,91 persen dan Sumbawa Barat sebesar 13,54 persen. Namun nyatanya harga rata-rata beberapa bahan pokok di Sumbawa jauh lebih murah

dari Sumbawa Barat, sedangkan alokasi pengeluaran penduduk miskin Sumbawa Barat lebih banyak untuk konsumsi makanan.

Tabel 1. Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok di Sumbawa Barat dan Kabupaten tetangga tahun 2021

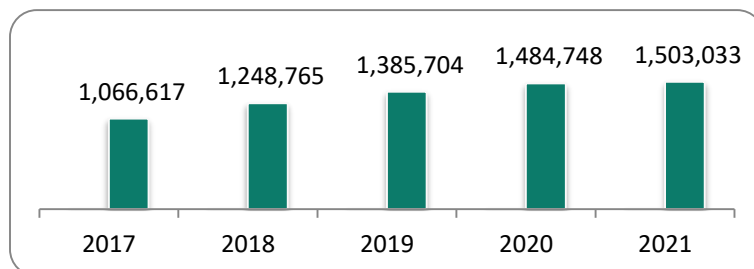
Beberapa Bahan Pokok	KSB	Sumbawa	Mataram	Lotim
Beras biasa	10,000	9,667	10,318	11,925
Daging Sapi	130,000	127,083	128,349	124,767
Daging Ayam Ras	45,417	42,646	36,396	40,267
Telur Ayam Ras	23,633	23,042	24,581	22,898
Minyak Goreng	12,500	11,000	13,034	12,238
Kelapa Tua	8,000	6,333	7,758	-
Tomat Sayur	10,917	10,000	8,325	6,683
Cabai Merah	39,583	39,375	27,922	24,825
Cabai Rawit	67,083	64,167	32,788	24,350
Bawang Merah	27,500	27,500	33,489	29,032
Bawang Putih	30,000	27,458	28,174	29,767
Tempe Kedele	15,417	13,500	12,067	11,333
Gula Pasir	14,000	14,875	14,376	13,508

Ketika garis kemiskinan Sumbawa Barat jauh di atas Sumbawa namun persentase penduduk miskinnya di bawah Sumbawa, dapat menjadi indikasi bahwa kualitas sosial ekonomi penduduk Sumbawa Barat lebih baik dari Sumbawa. Apabila harga-harga di Sumbawa Barat dapat dikontrol sehingga tidak lebih mahal dari kabupaten tetangga, patut diduga bahwa persentase penduduk miskin Sumbawa Barat dapat semakin dikikis. Untuk itu, perlu dikaji lebih dalam penyebab harga yang lebih mahal ini. Jika dibandingkan, harga beras bantuan yang diterima penduduk miskin Sumbawa Barat ternyata jauh lebih mahal dibandingkan kabupaten tetangga dan kota yang telah mencapai persentase kemiskinan 1 digit.

Tabel 2. Persentase Ruta Miskin Penerima BPNT/Program Sembako, Jumlah Beras yang Diterima dan Harga yang Dibayarkan per Kg 2021

Kab/Kot	Persentase Ruta Miskin Penerima BPNT/ Program Sembako	Jumlah kg/bulan	Harga per kg
(1)	(2)	(3)	(3)
Sumbawa Barat	38.30	8.86	11 348
Lombok Timur	35.94	10.19	10 368
Sumbawa	36.33	13.96	10 560
Kota Mataram	37.97	10,68	10 870
Kota Bima	50.61	13.17	10 455

Persentase ruta miskin penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako lebih banyak dibandingkan Kota Mataram, Sumbawa, dan Lombok Timur, namun jumlah kg yang diterima jauh lebih kecil dan bahkan yang terkecil dibandingkan Lombok Timur, Sumbawa, Kota Mataram, dan Kota Bima. Yang menjadi catatan penting adalah harga beras bantuan yang diterima di Sumbawa Barat jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten tetangga tersebut.



Gambar 4. Pengeluaran per kapita per Bulan Kabupaten Sumbawa Barat 2021

Pengeluaran perkapita menjadi indikator jangkauan daya beli masyarakat. Dari sudut pandang lainnya, nampak bahwa pengeluaran konsumsi per kapita per bulan masyarakat Sumbawa Barat tahun 2021 telah mencapai 1,5 juta rupiah. Nilai ini ternyata masih jauh di bawah upah minimum Kabupaten Sumbawa Barat yang telah ditetapkan Gubernur Provinsi NTB, yaitu sebesar Rp2.278.710. Apabila pendapatan penduduk sudah sesuai dengan UMK, namun pengeluaran hanya Rp1,5 juta artinya masih ada tersisa pendapatan untuk ditabung. Namun apabila pengeluaran senilai Rp1,5 juta ini disebabkan pendapatan yang minim, maka hal ini juga perlu dipertimbangkan sebagai salah satu penyebab masih tingginya kemiskinan di Sumbawa Barat.

Berkaca dari Kabupaten Tetangga

Rumput tetangga tidak selamanya lebih hijau dari rumput sendiri, namun tidak ada salahnya sesekali berkaca ke kanan dan kiri untuk mengevaluasi diri. Posisi Geografis Sumbawa Barat bertetangga dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa. Persentase kemiskinan di Sumbawa Barat lebih rendah dari kedua kabupaten

tersebut, namun sewaktu-waktu posisi ini dapat tergantikan mengingat selisih persentase penduduk miskin Sumbawa dan Sumbawa Barat relatif tipis. Yang diinginkan oleh Sumbawa Barat adalah

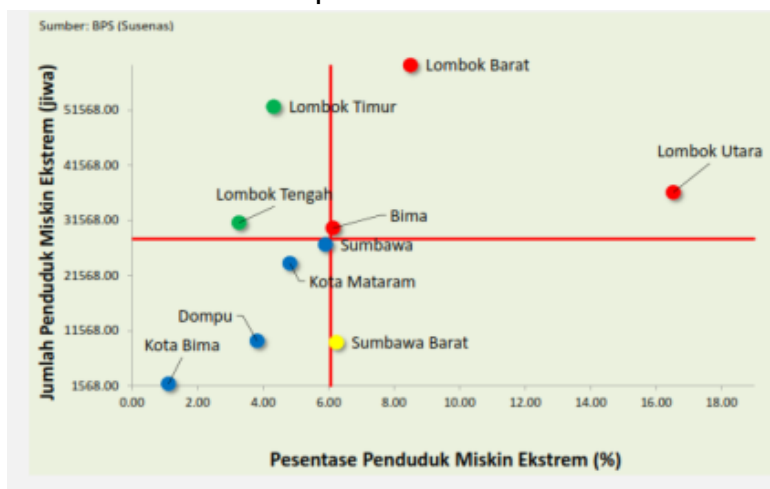
mencapai kemiskinan 1 digit. Oleh karenanya, Kota Mataram dan Kota Bima layak menjadi *benchmark* sebagai motivasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2021

Kab/Kot	< SD	Tamat SD/SMP	>SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumbawa Barat	25.23	49.03	25.74
Lombok Timur	28.32	48.42	23.27
Sumbawa	15.97	58.96	25.07
Kota Mataram	16.13	61.14	22.73
Kota Bima	21.30	27.81	50.89

Proporsi penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Sumbawa Barat yang tidak tamat SD mendekati Lombok Timur. Apabila melihat Kota Mataram, proporsi penduduk miskin tertinggi adalah tamatan pendidikan dasar (SD/SMP) sedangkan Kota Bima lebih banyak penduduk miskin dengan pendidikan di atas SMA. Proporsi Penduduk miskin

Sumbawa Barat yang tertinggi juga merupakan tamatan pendidikan dasar. Bermodalkan pendidikan dasar, tidak banyak jenis pekerjaan yang dapat dipilih untuk bertahan hidup, demikian juga dengan penghasilannya acapkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

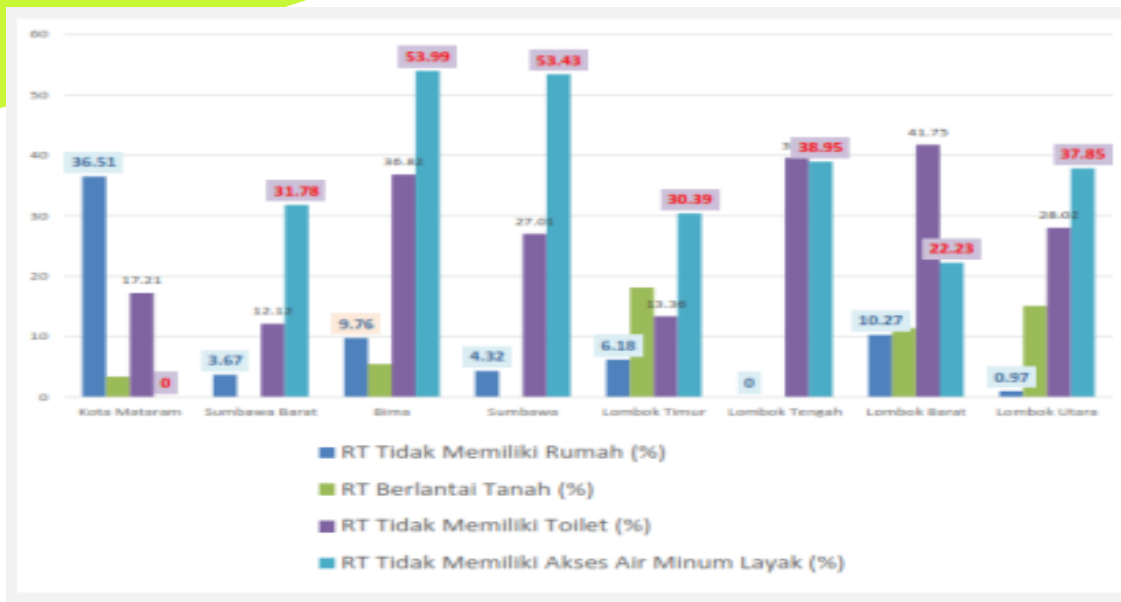


Gambar 5. Kemiskinan Ekstrem di NTB

Sumbawa Barat termasuk dalam 8 wilayah di NTB yang menjadi fokus nasional penanganan kemiskinan ekstrim. Jumlah penduduk miskin ekstrim di Sumbawa Barat memang relatif sedikit

namun ternyata lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Sumbawa.





Gambar 6. Kondisi Perumahan Penduduk Miskin Ekstrim NTB

Hampir tidak ada penduduk miskin ekstrim Sumbawa barat yang berlantai tanah, namun sayangnya akses terhadap air minum layak merupakan yang paling banyak dialami penduduk miskin ekstrim Sumbawa Barat.

Rekomendasi

Dengan beberapa uraian di atas, telah diperoleh gambaran lebih rinci mengenai karakteristik penduduk miskin di Sumbawa Barat. Meningkatkan pendapatan dan menurunkan harga agar terjangkau untuk dibeli menjadi rumus sederhana penurunan penduduk miskin. Namun, upaya yang harus dilakukan tidaklah sesederhana itu. Berdasarkan apa yang telah diuraikan maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upayakan bantuan kepada petani miskin agar pendapatannya dapat meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan 2100 kkal. Program Pemda yang mewajibkan ASN membeli beras petani lokal sudah sangat baik untuk membantu petani. Namun perlu dipahami disini bahwa petani yang bekerja di sektor pertanian tidak hanya petani pemilik

lahan, namun juga termasuk mereka buruh tani lepas yang tidak memiliki lahannya sendiri. Oleh karenanya, perlu dirumuskan kebijakan yang bisa membantu meningkatkan pendapatan buruh tani, misalkan melalui dana bantuan modal kerja atau diklat untuk memulai UMKM sendiri.

2. Atasi pengangguran di kalangan penduduk miskin untuk menurunkan kemiskinan sekaligus Tingkat pengangguran terbuka. Opsi yang dapat dilakukan ada 2, pertama buka lapangan pekerjaan yang mampu menampung tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah atau opsi kedua tingkatkan pendidikan maupun keterampilan tenaga kerja agar mampu diterima dengan lapangan pekerjaan yang ada di Sumbawa Barat.
3. Tanggulangi harga-harga di Sumbawa Barat Tim pengendali inflasi daerah perlu berbenah dan mengupayakan untuk menekan harga-harga utamanya harga bahan pokok di Sumbawa Barat.
Jangan jadikan keberadaan tambang AMNT sebagai kambing hitam tidak dapat

dikendalikannya harga. Pelajari dan perbaiki jalur distribusi barang agar pasokan barang aman. Pada prinsipnya, mekanisme pasar akan berlaku apabila jumlah *supply* memenuhi *demand*. Apabila diperlukan buat regulasi khusus untuk mengendalikan harga-harga. Pelajari bagaimana harga di kecamatan perbatasan (Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa) bisa lebih murah dari Taliwang dan upayakan agar harga di Sumbawa Barat dapat serupa.

4. Atasi kemiskinan ekstrim Sumbawa Barat untuk dapat lebih cepat mencapai kemiskinan 1 digit. Pengeluaran penduduk yang termasuk dalam kategori miskin ekstrim harus dapat menjangkau Rp35.823 (US\$1,9) per hari. Untuk itu diperlukan kajian lebih teliti penyebab unik dari kemiskinan ekstrim di Sumbawa Barat untuk merumuskan program khusus dalam mengatasinya. Untuk itu data detail mengenai penduduk miskin ekstrim mutlak diperlukan.